

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA UNTUK MENILAI EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PADA KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR

Dwi Putri Ramahadiyanti^{1*}, Lailah Fujianti², Ameilia Damayanti³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

*E-mail Correspondence : dwiputriramahadiyanti@gmail.com

Diterima 03 Mei 2024, Disetujui 21 Mei 2024

Abstrak

Laporan realisasi anggaran adalah hal yang sangat penting bagi suatu instansi atau lembaga, Laporan anggaran mempunyai fungsi untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana efisiensi kinerja keuangan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor melalui Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022. Laporan Pelaksanaan Anggaran memberikan gambaran mengenai sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah serta alokasi dan penggunaannya, yang menunjukkan suatu anggaran dan kinerja dalam periode pelaporan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja di Kantor Kecamatan Dramaga memperoleh rata-rata sebesar 93,75% yang dimana masuk ke dalam kategori tidak efisien, Hal ini terjadi akibat adanya pemborosan anggaran belanja karena penganggaran yang berorientasi pada kinerja tidak berdasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan saja tetapi juga berdasarkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dimana pelaksanaannya terfokus pada efisiensi.

Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Kinerja, dan Efisiensi

Abstract

Budget realization report is very important for an agency or institution, Budget report has a function to find out how the financial condition of a company or institution. The purpose of this study is to analyze how efficient the financial performance of Dramaga District, Bogor Regency through the 2018-2022 Budget Realization Report. The Budget Implementation Report provides an overview of the economic resources managed by local governments and their allocation and use, showing a budget and performance in the reporting period. The method used in this study is quantitative descriptive using the calculation of efficiency ratios. The results showed that the level of shopping efficiency at the Dramaga District Office obtained an average of 93.75% which was included in the inefficient category, this occurs due to the waste of budget because performance-oriented budgeting is not based on needs and considerations alone but also based on predetermined goals where the implementation is focused on efficiency.

Keyword: Budget Realization, Performance, and Efficiency

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010, transparansi ialah pemberian info mengenai keuangan yang diberikan langsung kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan umum, dan masyarakat berhak untuk memahami sepenuhnya penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. pengelolaan sumber daya tertentu. Transparansi akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga menghasilkan pemerintahan daerah yang akuntabel, bersih, responsif, efisien, dan efektif terhadap aspirasi program dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem anggaran dirancang sesuai dengan anggaran bisnis yang kuat kaitannya dengan rencana strategis dan visi yang ingin dicapai. Terdapat unsur-unsur penganggaran kinerja yaitu terdiri dari, standar biaya, ukuran kinerja dan indikator kinerja. Ketiga elemen tersebut adalah alat untuk mengevaluasi input, output, dan outcome program berbasis kinerja untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Jika efektivitas dan efisiensi kinerja tercapai maka akan tercipta akuntabilitas dimana hal ini merupakan visi seluruh organisasi sektor publik.

Pengelolaan anggaran suatu instansi atau organisasi yang telah disusun dan digunakan untuk kegiatan usaha akan dievaluasi kembali melalui realisasi anggaran. Realisasi anggaran merupakan jumlah penerimaan yang tersedia dalam satu tahun yang disahkan melalui anggaran pemerintah untuk membayar hutang dan pengeluaran pada periode tertentu. Setiap unit wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena informasi dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sangat berguna dalam menelaah mengenai sumber daya ekonomi, tanggung jawab, dan kepatuhan tentang ketentuan anggaran oleh entitas pelapor. Hasil Laporan Realisasi Anggaran akan ditransfer pada neraca Kelompok Dana Ekuitas yang ada. Setiap laporan disusun sesuai pada Prinsip Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah daerah adalah suatu organisasi sektor publik yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, termasuk pengelolaan fiskal daerah dengan memakai hasil pengelolaan tersebut agar dapat memaksimalkan potensi - potensi yang ada dan dapat meningkatkan pembangunan daerah (Rusdi, 2018).

Anggaran belanja pemerintah harus dimanfaatkan lebih besar dibandingkan anggaran daerah karena demi kesejahteraan masyarakat, penting dilakukan evaluasi untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran dan dijadikan tolak ukur pertumbuhan pendapatan dan kinerja keuangan. pengeluaran tahunan. Pemahaman posisi keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan program yang sedang berjalan dan pencapaian target anggaran dapat dilihat dari catatan laporan pencapaian anggaran (LRA).

KAJIAN TEORI

Hadi, 2011 menyatakan bahwa stakeholder adalah seluruh pihak, secara internal dan eksternal, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi atau terkena dampak suatu perusahaan.

Bastian, 2021 mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses teknis serta analisis akuntansi yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga yang lebih tinggi dan lebih rendah untuk mengelola berbagai dana publik, dengan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Fuad, 2020 berpendapat bahwa anggaran ialah rencana yang disusun secara sistematis dan analisis dalam bentuk angka kemudian dinyatakan dalam satuan moneter, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam periode tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah mengacu pada semua hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah di semua tingkatan selama proses pelaksanaannya yang dapat diukur dalam satuan moneter, serta segala bentuk yang berkaitan dengan administrasi daerah. pengelolaan yang dapat menjadi kekayaan milik daerah. Hak dan kewajiban daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang memberikan suatu informasi

tentang, belanja, realisasi pendapatan, surplus/defisit, transfer pembiayaan dan sisa pembiayaan di atas/di bawah anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran pada jangka waktu tertentu.

Kinerja pemerintah adalah tingkat tercapainya tujuan atau sasaran suatu lembaga pemerintah mengenai pemaparan visi, misi, dan strategi lembaga pemerintah tersebut, yang menunjukkan berhasil dan gagal lembaga tersebut dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut (Mardiasmo, 2018), efisiensi adalah tercapainya output maksimal dari input yang tersedia atau rendahnya input yang digunakan untuk mencapai output tersebut. Untuk mengukur efisiensi keuangan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2016)

Tabel 1. Kriteria Efisiensi

Rasio Efisien	Kriteria Efisien
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Menurut (Mardiasmo, 2009), value for money merupakan suatu konsep manajemen yang didasarkan dengan tiga unsur, yaitu ekonomi yang melibatkan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan

harga terendah, dan efisiensi yang melibatkan keberhasilan output maksimum dengan input tertentu, serta efektivitas yaitu rencana berkaitan erat dengan sejauh mana tujuan yang telah ditentukan tercapai.

METODE

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah ditentukan, maka jenis penelitian yang akan diterapkan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang akan digunakan dalam laporan realisasi ialah anggaran belanja di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor tahun 2018-2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, studi pustaka dan wawancara. Objek penelitian ini yaitu Kecamatan Dramaga dengan melihat realisasi anggaran belanja dengan efisiensi kinerja keuangan di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja

Berdasarkan hasil penelitian dari laporan realisasi anggaran belanja dapat dilihat bahwa anggaran tahun 2018 sebesar

2. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja

Tabel 2. Hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kecamatan Dramaga

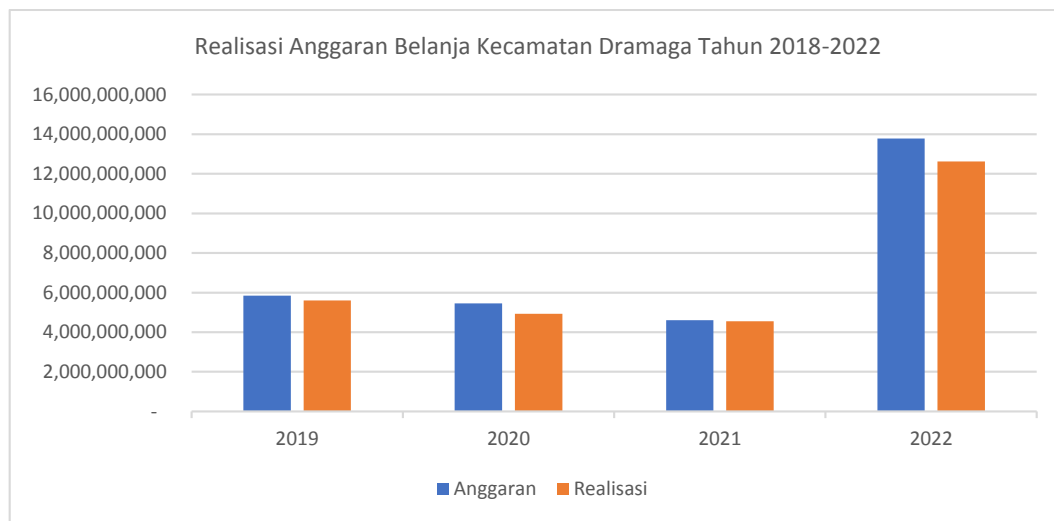
Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Analisis Efisiensi
2018	6.216.461.000	5.943.585.287	95,61	Kurang efisien
2019	5.842.868.000	5.597.147.303	95,79	Kurang efisien
2020	5.448.504.000	4.930.241.936	90,49	Kurang efisien
2021	4.602.153.262	4.545.982.019	98,78	Kurang efisien
2022	13.774.517.409	12.624.363.911	91,65	Kurang efisien
TOTAL	35.884.503.671	33.641.320.456	93,75	Kurang efisien

Sumber: Kecamatan Dramaga, Data diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil rasio efisiensi anggaran belanja terlihat bahwa pola perkembangan efisiensi kinerja dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Dramaga selama tahun 2018-2022 cenderung naik

Rp. 6.216.461.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.943.585.287, pada tahun 2019 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 5.842.868.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.597.147.303, pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 5.448.504.000 dengan realisasi Rp. 4.930.241.936, pada tahun 2021 anggaran kembali mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.4.602.153.262 dengan realisasi Rp. 4.545.982.019, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 13.774.517.409 dengan realisasi Rp.12.624.36.911. Anggaran terbesar berada di tahun 2022 karena Kecamatan Dramaga melakukan pembangunan gedung, sedangkan anggaran terkecil berada di tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan anggaran dari pemerintah.

turun dengan rata – rata efisiensi sebesar 93,75% yang berarti kinerja dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Dramaga dikatakan kurang efisien.



Gambar 1. Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Dramaga Tahun 2018-2022

Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan rasio efisiensi laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018-2022 di Kecamatan Dramaga rata-rata berada pada tingkat efisiensi yang rendah. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin rendah efisiensi pengelolaan keuangan belanja di Kecamatan Dramaga, hal ini dikarenakan realisasi anggaran belanja langsung mempengaruhi tingkat target efisiensi pelaksanaan anggaran. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin tidak efisien anggaran yang digunakan. Namun anggaran yang dilaksanakan Kabupaten Deramaga dapat dikatakan efektif karena lembaga tersebut mampu mengelola anggarannya dengan baik.

Realisasi belanja langsung terhadap realisasi belanja keseluruhan terdiri dari belanja modal, belanja pegawai berupa upah dan honorarium, serta belanja barang dan jasa, sementara untuk belanja keseluruhan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berisi belanja pegawai atau tunjangan. Adapun program kerja yang dilakukan Kecamatan Dramaga secara rutin mengenai unsur pemerintahan berupa pelayanan kependudukan, unsur pendidikan dan kesehatan

berupa pelayanan posyandu untuk balita dan posbindu untuk lansia, unsur pemberdayaan masyarakat, unsur ketentraman dan ketertiban umum, dan unsur ekonomi pembangunan.

Efisiensi belanja pada Kecamatan Dramaga tahun 2018-2022 mengalami perubahan persentase setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mencapai 96,51%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 95,79%. Tingkat efisiensi anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2018-2022 yang masing-masing persentasenya sebesar 90,49%, 98,78%, dan 91,65%. Tingkat efisiensi tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 98,78% dan tingkat efisiensi terendah berada di tahun 2020 sebesar 90,49% dengan rata-rata persentase selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 93,75%.

Ukuran tingkat efisiensi diukur berdasarkan seberapa baik suatu instansi atau organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan hasil yang dituju dan diinginkan. Karena efisien lebih ditunjukkan kepada sumber daya yaitu menggunakan dana yang minimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan perhitungan secara rata-

rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor selama tahun anggaran 2018-2022 berada di persentase diatas 90% dan hal tersebut dapat dinyatakan dalam kategori kurang efisien. Hal ini dikarenakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor merupakan instansi yang tidak memiliki penghasilan jadi instansi tersebut hanya melakukan transaksi pengeluaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di kantor Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dengan perhitungan mengenai Realisasi anggaran belanja pun mengalami kenaikan dan penurunan selama tahun 2018-2022, yang dimana anggaran tertinggi berada di tahun 2022 sebesar Rp. 13.774.517.409 yang terjadi karena adanya pembangunan gedung Kantor Kecamatan Dramaga sehingga anggaran menjadi lebih besar dan anggaran terkecil berada di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 4.602.153.262 karena adanya kasus pandemi covid-19 yang dimana mengakibatkan adanya penurunan anggaran dari pemerintah. Realisasi anggaran pada Kecamatan Dramaga sudah dilakukan sesuai rencana berdasarkan tujuan mulai dari proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban yang artinya realisasi anggaran belanja Kecamatan Dramaga sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2. Berdasarkan dengan perhitungan anggaran mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dari tahun 2018-2022 mengenai penilaian tingkat efisiensi kinerja keuangan terlihat belum cukup baik. Dapat dilihat dari penilaian tingkat efisiensi Kecamatan Dramaga berada di rata – rata tingkat efisiensi yang mencapai 93,75% jadi rata-rata yang telah di dapatkan pada tahun 2018 sebesar 95,61%, tahun 2019 sebesar 95,79%, tahun 2020 sebesar 90,49%, tahun 2021 sebesar 98,78%, dan pada tahun 2022 sebesar 91,65%, dimana dalam kriteria persentase efisiensi yang berada di angka 90% – 100% diartikan bahwa pelaksanaan kinerja keuangan masih kurang efisien. Oleh karena itu Kecamatan Dramaga masih belum mampu meminimumkan anggarannya untuk mencapai output yang maksimal.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan, kebijakan, maupun anggaran agar terciptanya integritas, transparansi, dan keterpaduan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya serta memahami tentang bagaimana konsep belanja, sehingga perencanaan dan pengendalian pengeluaran anggaran belanja dapat diminimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal guna terciptanya kriteria efisiensi yang ditargetkan agar dapat lebih

- efisien agar sesuai dengan yang sudah diharapkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti anggaran belanja secara menyeluruh setiap tahun dan meneliti bagaimana proses kegiatan serta program kerja anggaran yang dilakukan dengan lebih detail, juga bisa menambahkan rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintahan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
 3. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan, penulis tidak menyarankan untuk menggunakan rumus Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 karena rumus tersebut tidak cocok digunakan dalam ranah sektor publik yang dimana seharusnya intansi tersebut dapat menghabiskan anggarannya dengan baik dan dapat dikatakan efisien namun hal didapatkan malah sebaliknya. Hal ini juga didasarkan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, C., & Setiawan, T. (2021). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPITAL STRUCTURE DAN FINANCIAL PERFORMANCE (Studi pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar 2015 -2019)*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 1(2), 113-122. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i2.2273> Bas tian. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Badzlina, D., Amyulianthy, R., & Munira, M. (2020). *PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2014-2018)*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 1(1), 12-23. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1811>.
- Fuad, M., Sukarno, E., Sugiarto, Moeljadi, Christina, E., R.N, F., & M, H. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. PT Gramedia Utama.
- Hadi, N. (2011). *Corporate Social Responsibility*. graha ilmu.
- Jamal Muhyidin, Sri Ambarwati, & Widyaningsih Azizah. (2021). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 2(1), 49-61. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i1.2822>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, UII Press.
- Mandagie, Y. R. O., Febrianti, M., & Fujianti, L. (2020). *ANALISIS PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN INVESTASI DAN TOLERANSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila)*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 1(1), 35-47. <https://doi.org/10.35814/relevan.v1i1.1814>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Munira, M., Astuti, S. B., & Damayanti, A. (2022). *ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN KONSEP SHARIAH MAQASHID INDEX*. RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 3(1), 41-55. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4008>
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No.12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rusdi, M. (2018). *Penelitian Desain dan Pengembangan Kependidikan (Konsep, Prosedur, dan Sintesis Pengetahuan Baru)*. PT Raja Grafindo Persada.